

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2011. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin,2011,*Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Djemabut, 1986, *Perumahan dan Pemukiman*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pers.
- Goenawan, 2009, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Properti*, Yogyakarta : Best Publisher.
- Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta : Gadjah Mada University Pers.
- Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, 1984, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Pers.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta : UI Press.
- Soedalhar, 1984, *UUPA dan Landeform, Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Hukum Tanah*, Surabaya : Karya Bhakti.

Soegijatno Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Pers.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Pers.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sunarto, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : Amus dan Citra Pustaka.

Urip Santoso, 2014, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana.

Yudhi Setiawan, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Depok : Rajawali Pers.

Zein Ramli, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam Undang – Undang Pokok Agraria*. Jakarta : Rineka Cipta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai mana di ubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai mana di ubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (persero))

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi

### **C. Tesis dan Skripsi**

Aisyah, 2009. "Pengelolaan Tanah Aset Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Barang Milik Negara Di Kota Payakumbuh". *Tesis*. Universitas Andalas.

Agustin, 2020, "Pengawasan Praktik Akupuntur Terapis di Kota Padang", Skripsi S1 Universitas Andalas, Padang.

### **D. Jurnal dan Website**

Alda Vidia Vergionita Dkk, 2022, "Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Sistem Zonasi Pembangunan Hotel Melalui Perijinan Kabupaten Bandung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 3, No. 1, 2022.

Moh Gandara, 2020, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol.2, No.3, 2020.

Oki Nasrul, 2019, "Pemanfaatan Tanah Aset Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Ii Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga", *Soumatra Law Review*, Vol.2, No.2, 2019.

Irene Mariane, "Solusi Rusun Atas Penggusuran Permukiman di Pinggir Rel Kereta", [https://www.hukumonline.com/klinik/a/solusi-rusun-atas-penggusuran-permukiman-di-pinggir-rel-kereta-lt60507aa0baf12#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/solusi-rusun-atas-penggusuran-permukiman-di-pinggir-rel-kereta-lt60507aa0baf12#_ftn1), (diakses pada tanggal 23 Februari 2024 pada jam 11.00).

Hendrawan, 2022, "Apa itu Grondkaart? Ini Penjelasan dan Legalitasnya di mata hukum", <https://www.headline.co.id/3175/apa-itu-grondkaart-ini-penjelasan-dan-legalitasnya-dimata-hukum/>, (dikunjungi pada tanggal 18 Juni 2024 pada jam 13.00.)

Setyawan, 2017, "Memahami "Grondkaart" sebagai Bukti Kepemilikan Tanah", <https://www.kompasiana.com/udiartya/5a1e29aeb3f86c691f685932/memahami-grondkaart-sebagai-bukti-kepemilikan-tanah>, (Dikunjungi pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 18.00.)